

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Papua yang terletak dibagian timur negara Kesatuan Republik Indonesia masuk dan diakui sebagai bagian dari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 November 1969 melalui PBB NO.2504. hal ini menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum Internasional. Papua menjadi daerah otonom yang diakui bagian indonesia pada tahun yang sama melalui UU NO.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Rumbiak, 2005). Akan tetapi, sejak menjadi bagian dari negara Indonesia, sebgaiian penduduk Papua tidak merasa puas dengan Pemerintahan Indonesia karena Papua menjadi daerah miskin. Sedangkan, Papua secara luas wilayah lebih luas dari jawa akantetapi Pemerintah Indonesia hanya memajukan daerah jawa dan meninggalkan Papua. Papua memiliki kondisi kemiskinan sekitar 74% penduduk Papua di Indonesia.

Secara perekonomian pun jauh tertinggal dari Provinsi – Provinsi lain yang ada diIndonesia. Dengan ketidakpuasan tersebut atas ketimpangan perekonomian itulah, yang memunculkan Gerakan separatisme di Papua yang menginginkan Papua untuk memerdekakan diri dan memisahkandiri dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan separatisme adalah gerakan yang membuat kehancuran bagi suatu negara yang berdaulat seperti negara Indonesia. Indonesia pernah mengalami hal tersebut saat lepasnya Timor Timur dari indonesia dengan dimulainya konflik bersenjata antara pihak Timor Timurdan Pemerintah Indonesia. Hal yang sama terjadi pada papua yang terindikasi adalah konflik yang sama karena wilayah tersebut sangat berdekatan dengan pihakasing dan menjadi ancaman bagi negara Indonesia ketika suatu daerah tersebut dibawah pengaruh pihak asing untuk keluar dari bagian NegaraKesatuan Republik Indonesia yang ada didalamnya terdapat unsur SARA, ekonomi, politik dll. Selain aspek ekonomis, gerakan separatisme di Papua muncul juga oleh konflik yang berakar karena kecewaakan historis, diskriminasi sosial, politik dan hukum (Andriyanto, 2001). Secara geografis, populasi dan budayanya papua sulit diingkari dengan keterlibatannya terhadap pasifik selatan. Integrasi antara Indonesia – Papua tidak terlepas dari sifatpolitis karena dengan perkembangan historical kolonialisme dan perkembangan politik pasca – pendudukan Belanda di tanah Indonesia.

Karena dinilai Pemerintah Indonesia telah gagal dalam mensejahterakan Daerah Papua, dengan diadakannya Operasi Militer yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi Gerakan Separatisme di Papua pun menimbulkan Pelanggaran HAM, pada Mei 1977 para Gerilyawan OPM (Operasi Papua Merdeka) menyerang Freefort dengan direspon oleh Operasi Militer, karena Tanah Freefort merupakan tanah adat suku Amugme dan komoro. Dan beberapa kasus lain, seperti kasus Wasior (2001) dan kasus Wamena (2003) yang disebabkan oleh konflik aparat dan warga setempat. Dan gerakan Separatis menuduh aparat keamanan atau pemerintah telah melakukan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal tindakan separatis, telah melanggar dan melawan hukum nasional maupun UUD 1945 [Harianja, 2020]. Dengan beberapa rentetan kasus konflik yang terjadi di Papua, fakta bahwa konflik Papua adalah konflik internal terlama sepanjang sejarah Indonesia. Maka diperlukan skema penyesuaian baru yang dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua [Thomas Agung Kurnianto, Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik, 2022].

Dalam langkah resolusi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi permasalahan di Papua, Pemerintah Pusat sudah tidak seharusnya mengambil langkah untuk melakukan pendekatan keamanan yang berlebihan atas konflik tersebut. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bahwa menyelesaikan konflik di Papua sebaiknya dengan melakukan pendekatan humanis [CNN, Ma'ruf Pesan ke Panglima Baru TNI agar sikapi Papua dengan Humanis, 2021]. Dalam penyelesaian Konflik di Papua dengan menggunakan proses humanis salah satunya adalah dengan metode dialog dilakukan dengan perlunya dicari titik temu antara Pemerintah Indonesia dengan Pihak OPM (Operasi Papua Merdeka) dengan beberapa isu – isu yang dapat di tawarkan. Akan tetapi, hingga hari ini bahwa penyelesaian secara dialog yang dilakukan oleh antara dua pihak tersebut belum dilakukan karena antara kedua belah pihak tersebut memiliki perspekti yang berbeda. Dalam sisi Pemerintah Indonesia tetap ingin mempertahankan wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI. Akan tetapi, dalam pihak OPM masih tetap ingin memerdekakan diri dari bagian Indonesia [Thomas Agung Kurnianto, Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik, 2022].

Gerakan Separatisme Papua sudah melakukan aksi – aksi soft power dengan melakukan diplomasi kepada pihak asing untuk membantu mereka dalam memerdekakan diri dari bagian NKRI. Sudah banyak propaganda – propaganda yang dilakukan untuk mempengaruhi dunia internasional walaupun secara perundingan PEPERA yang dilakukan pada 14 Juli – 2 Agustus 1969 oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) sudah selesai dan dianggap bahwa Papua adalah bagian dari negara Indonesia. Akan tetapi, masih banyak pihak yang ingin memajukan kemerdekaan Papua dan termasuk dalam pihak Pro – Separatisme. Amerika Serikat adalah negara yang berperan besar dalam mendukung

kebijakan sukarno dan suharto dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Itu adalah strategi yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengambil hati Indonesia dan menjauhkan Indonesia dengan hubungannya dengan Uni Soviet dan itu salah satu proxy war terbesar dalam sejarah yang melibatkan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dengan dukungan Amerika Serikat tersebut maka Amerika pun dapat keuntungan lebih yang didapat dari konflik tersebut dengan mudahnya untuk mengeksploitasi tambang terbesar di dunia dengan kekayaan tembaga dan emas di Grassberge, Papua sejak tahun 1967 (Nainggolan, 2014).

Berdasarkan dengan adanya sebuah kekhawatiran tentang integrasi teritorial yang terbentuk dengan kekhawatirannya terhadap campur tangan Internasional. Semisal, keterlibatan Pihak Australia dalam Konflik Papua. Hal ini dapat dilihat ketika Australia memberikan sebuah suaka Politik terhadap 42 warga negara Indonesia asal Papua pada tahun 2006, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai seberapa jauh mengenai intervensi Australia terhadap kondisi Politik domestik Indonesia. Itu pun menjadi suatu hal yang bertentangan karena Australia sendiri menyatakan bahwa berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya indikasi terhadap beberapa kelompok LSM dan senator yang ikut dalam mendukung gerakan separatis dalam konflik di Papua. Berbagai Kampanye Papua merdeka juga beberapa kali difasilitasi oleh kelompok – kelompok tersebut. Dan terdapat indikasi bahwa adanya keterkaitan antara gerakan separatis dengan persekutuan gereja Australia [Mangunban, 2006]. Pers di Australia pun beberapa kali memojokan Pemerintah Indonesia dalam permasalahan Konflik Papua. Hal itu pun termasuk dalam salah satu tulisannya di The Age., seorang wartawan Australia Joh Martinkus menulis pada tahun 2003 saat berkunjung ke lokasi konflik di Papua, “ The intimidation and attacks on human rights workers by the Indonesian military and the outrage of the west Papuan leaders.” Peristiwa ini bertepatan dengan diberlakukannya otonomi Khusus (OTSUS) di Papua tahun 2001. dalam tulisannya, berkaitan dengan Aceh dan Maluku, daerah – daerah yang rawan karena genosida masih terus berlangsung [Wardhani, 2006].

Ryamizard Ryacudu yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun (2014 – 2019), menilai bahwa ada intervensi dari pihak luar yang menjadikan konflik di Papua dan beberapa wilayah konflik berlangsung. Ia menilai, intervensi luar ini tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam. “kenapa ini berulang ulang terus ada backing-nya. Ini ada intervensi dari luar,” kata ryamizard (Ryacudu, 2016). Dengan adanya pengaruh asing dalam strateginya Proxy War yang didalamnya terdapat taktik adu domba untuk memecah belah integritas antara Papua dengan Pemerintahan Indonesia. Proxy war kini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia dengan adanya globalisasi ini akan makin banyak bagi suatu negara melakukan proxy war terhadap suatu negara untuk memecah belah persatuan. Proxy war sudah dilakukan sejak era kuno walaupun tidak banyak seperti di era

sekarang, ini telah disampaikan oleh Letjen TNI Gatot Nurmanty dalam kuliah Umum bertajuk “Peran Pemuda dalam menghadapi Proxy War” di UI Thun 2014, dengan seiringnya perkembangan pengetahuan dan Teknologi. Bahwa ada pergeseran antara dalam karakteristik dan perang (Gerdinand, 2016). Ancaman Separatisme ini sering terjadi melalui konflik berkepanjangan yang tidak pernah selesai didalam negeri ini, dalam sejarah perkembangan Indonesia sudah banyak usaha – usaha dari kelompok – kelompok tertentu untuk mengganggu kedaulatan Indonesia salah satunya adalah dengan tragedi DII/TII, serta gerakan aceh merdeka (GAM) dalam keinginannya untuk meruntuhkan kedaulatan Indonesia dengan memecahkannya dari dalam negeri (Claudio Euaggelion Mariust Sumampouw M. G., 2022).

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- Faktor – Faktor apa saja yang menjadikan Konflik KKB Papua di Indonesia Berlangsung lama?

1.3. Tujuan Riset

Tujuan penelitian yang berjudul “Implikasi Gerakan Separatisme yang berkelanjutan dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (Organisasi Papua Merdeka) di Indonesia” adalah sebagai berikut:

- A. Menjelaskan Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai salah satu senjata untuk menjaga integritas nasional dari dalam maupun luar.
- B. Menjelaskan bahwa konflik Papua terjadi dari dalam Internal maupun secara Eksternal yaitu pihak asing
- C. Menjelaskan tentang keterlibatan dunia Internasional dalam konflik Papua dan bentuk secara resolusi yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan Konflik Papua.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian yang berjudul “ Implikasi Gerakan Separatisme Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (Organisasi Papua Merdeka) di Indonesia” adalah sebagai berikut:

- A. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai Konflik Papua sebagai salah satu Permasalahan dalam Integrasi Nasional bangsa Indonesia.
- B. Penelitian ini dapat memberikan adanya Keterlibatan Asing dalam Konflik .

C. Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pembelajaran untuk praktisi, Pemuda, Mahasiswa, Pemerintah bahwa dengan Menjaga Nasionalisme dalam diri adalah salah satu bentuk menjaga kedaulatan Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa sumber rujukan penelitian terdahulu mengenai Proxy war, Gerakan separatisme KKB Papua, Ketahanan Nasional Indonesia dll. Tentunya dalam menjadikan Proxy War ini sebagai objek atau pemahaman bagi setiap instrumen Masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan Integrasitas Nasional Indonesia. Adapun dengan tulisan ini bahwa argumentasi penulis adalah Gerakan Separatisme KKB Papua menjadi ladang keuntungan bagi kekuatan poros dunia atau kekuatan negara – negara besar untuk mendapatkan sumber daya alam Papua yang melimpah. Hal ini menjadikan tulisan ini sebagai karya akademik yang bersifat substantif untuk memberikan pemahaman mengenai Ketahanan Nasional Indonesia harus tetap dijaga dan tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh – pengaruh asing yang dapat merusak kedaulatan Indonesia.

Oleh karena itu Penelitian ini merupakan hasil analisis lanjutan dari Tesis Argumentasi yang terdapat pada subbab pembahasan yang belum dikaji oleh Peneliti seelumnya. Melalui Kajian Pustaka ini dapat menemukan pembahasan dan langkah resolusi kongkrit sesuai dengan tema yang dibahas. Dengan Kajian Pustaka ini dapat dibedakan antara hasil Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan yang sebelumnya sehingga peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang saling melengkapi berupa pengembangan bahasan studi terkait. Yang kemudian mampu dirujuk dan mampu dilanjutkan untuk Penelitian kedepannya.

Pertama, Strategi Pemerintah dalam menghadapi Proxy War sebagai salah satu penyebab Gerakan Separatisme di Indonesia ditulis oleh Nurwulansari, Panji Suwarno, Syamsunasir, Puji Widodo jurnal Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam ulasannya menjelaskan bentuk dari Perang Proxy adalah sebuah perang yang terjadi antara dua negara atau negara – negara akan tetapi tidak terlibat secara langsung, melainkan melibatkan Pihak Ketiga (Peran Pengganti). Perang dipasifik yang berdekatan dengan Indonesia akan menjadi Ancaman bagi Negara Kesatuan Indonesia. Singkatnya Perang Proxy adalah sebuah perpanjangan tangan bagi salah satu pihak negara untuk mendapatkan kepentingan strategisnya tanpa melibatkan secara langsung. Studi kasus yang diambil oleh penulis ini adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia dengan tragedi konflik bersenjata atau Gerakan Separatisme Melalui Perang Proxy ini tidak dapat mengenali siapa lawan dan kawan karena

dalam pihak ketiga mengendalikan non state actors dengan beberapa suplay untuk mendapatkan simpati dari suatu aktor tersebut.

Dengan penelitian yang saya tulis ada beberapa perbedaan dan acuan. yang saya temukan bahwa dalam penelitian ini menjelaskan beberapa langkah Proxy War dan langkah mencegah dari gerakan Proxy War berupa separatisme untuk kedaulatan Indonesia akan tetapi, dalam studi kasus ini diambil saat tragedi Timor Timur dalam sejarah Republik Indonesia dengan Penelitian penulis ingin melanjutkan dan mengkaji lebih lanjut mengenai isu Proxy War secara historical dan penulis ingin mengambil objek Gerakan Separatisme KKB Papua sebagai bentuk politik adu domba yang dilakukan oleh negara – negara Besar untuk meraup sumber daya alam yang ada dipapua dan meraih keuntungannya lainnya. Menjelaskan Posisi Papua yang terletak berdekatan dengan negara – negara yang berada dipasifik akan menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan. Dalam ulasannya yang ditulis dalam penelitiannya menjelaskan mengenai Aktivitas Gerakan Separatisme Papua didalam masyarakat Internasional, dalam penelitian ini dapat menjadi acuan mengenai penelitian saya. Dalam temuan penelitian ini cenderung menjelaskan bagaimana aktivitas gerakan separatisme papua di kancah internasional makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Papua telah melakukan perundingan yang disebut PEPERA pada tahun 1969 bahkan lebih jauh pada saat konferensi meja bundar pada masa pasca kemerdekaan.

Salah satu oknum yang terdapat dikalangan masyarakat Papua yang dimonitori oleh Operasi Papua Merdeka (OPM), telah melakukan berbagai cara untuk merealisasikan kepentingan mereka untuk lepas dan memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka melakukan kampanye Internasional untuk memanfaatkan dan memperoleh dukungan politik dari masyarakat Internasional untuk Kepentingan mereka. Aktivitas yang dilakukan di dunia Internasional berkembang kreatif dan pesat, dengan menirukan beberapa cara yang dilakukan oleh negara lain yang melakukan perjuangan separatis. Akan tetapi, hasil Penelitian ini bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah reaktif dalam merespon Isu gerakan separatis Papua. Penelitian ini akan menjadi acuan penelitian yang dan yang membedakan dari penelitian saya adalah bahwa saya membahas respon dari beberapa negara di dunia terutama negara – negarapasifik bahkan lebih jauh dataran Eropa. Pihak Asing akan merespon apa yang terjadi dalam kondisi Internal Indonesia itu sendiri dengan kasus ini Indonesia pernah dinyatakan sebagai pelakupelanggaran Hak Asasi Manusia dengan penyelesaian yang dilakukan dengan Operasi Militer dalam meredam konflik dengan Gerakan Separatisme di Papua. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini menjelaskan Operasi Militer Indonesia dituduh sebagai Pelaku Kejahatan Hak Asasi

Manusia (HAM) secara Nasional bahkan hingga dunia Internasional. Disertai, penjelasan mengenai respon dunia Internasional dalam menanggapi Isu HAM tersebut.

Ketiga, Perjanjian Keamanan Indonesia – Australia: Upaya Indonesia Untuk Mencegah Gerakan Separatisme di Indonesia Timur ditulis oleh M. Fathoni Hakim Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Departemen Hubungan Internasional Program Pascasarjana, Jakarta, 2010. Dalam ulasannya menjelaskan bahwa bagaimana perjanjian Indonesia dengan Australia untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, Papua secara geografis sangat strategis di wilayah pasifik dan berdekatan dengan Australia. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan untuk mendapatkan daerah Papua karena Papua selain wilayahnya yang strategis secara sumber daya alamnya melimpah. Konflik Papua sendiri sudah sejak lama terjadi walaupun hari ini redam akan tetapi bisa saja dimasa yang akan datang akan terjadi lagi konflik tersebut.

Dalam Penelitiannya ada hal yang menjadi suatu acuan dan pemahaman lanjutan mengenai langkah yang dilakukan Indonesia untuk mencegah konflik dengan pihak asing dengan melakukan perjanjian yang didalamnya terdapat beberapa poin yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Dalam pemahaman ini bahwa konflik yang terdapat di Papua bukan hanya faktor secara internal yang beralaskan bahwa Masyarakat Papua tidak merasa puas dengan Pemerintah Indonesia karena tidak merasa sejahtera. Akan tetapi, dalam konflik tersebut juga terdapat instrumen yang berasal dari pihak asing salah satunya adalah Australia. Secara historis, Indonesia pernah mengalami Pengaruh Proxy War dengan peristiwa pelepasan Timor Timur dengan pengaruh Australia dan beberapa negara didalamnya. Ini mungkin terjadi didalam konflik Papua bahwa Australia menganggap Papua selain wilayahnya yang strategis Papua dianggap sebagai *buff power* karena sumber dayanya yang melimpah dalam segi tembaga dan emas. Dengan itu, Penyelesaian Pemerintah Indonesia melakukan Perjanjian dengan Pihak Asing yaitu Australia untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian dalam konflik didaratan Indonesia Timur. Hal yang menjadi acuan dan perbedaan dalam penelitian saya adalah bahwa penelitian inipun juga menjelaskan dalam sektor pihak asing untuk menyelesaikan konflik ini dan dalam penelitian saya bahas adalah mengenai dengan perlakuan dalam pihak Internasional adalah ada yang bisa diambil secara positif bahwa dengan budaya demokratis dan Indonesia secara Kebijakan Luar Negeri Indonesia yaitu Bebas – Aktif itu menjadi sikap bahwa Indonesia didunia Internasional tidak berpihak dengan poros manapun. Dalam hal negatif, ada beberapa instrumen pihak asing terutama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Negara – negara himpunan Milanesia, dan negara – negara yang berdekatan dengan laut Pasifik pasti akan memiliki kepentingan dan merespon dalam Konflik tersebut dan beberapa negara tersebut memiliki kekuatan untuk mengancam Kedaulatan Indonesia.

1.5.2 Landasan Konseptual

A. Proxy War

Seiring dengan Perkembangan Teknologi, metode perang bergeser yang sebelumnya Perang Konvensional menjadi Perang Proxy yaitu ada pihak ketiga dalam suatu konflik tersebut. Perang Proxy jarang sekali didengar karena yang kita ketahui adalah Perang dingin atau Perang pasca Perang Dunia ke – 2. Akan tetapi, Perang Proxy sudah dilakukan sejak era kuno walaupun tidak banyak seperti yang dilakukan dalam era sekarang. Perang Proxy dapat diidentifikasi ketika Perang dingin antara Amerika Serikat yang berada dalam blok barat dan Uni Soviet berada dalam blok timur. Terdapat beberapa contoh dalam perang Proxy salah satunya Perang Korea, Perang Vietnam, Konflik Indonesia – Timor Timur, Perang Ukraina – Rusia, dll.

Konflik antar sesama bukan hal yang baru kita ketahui, bahwa banyak sekali peristiwa perang dalam sejarah manusia. Dinamakannya Perang Proxy adalah karena adanya pihak ketiga dalam suatu konflik tersebut dengan menghindari konfrontasi konflik secara langsung dan menghindari dampak secara signifikan bahkan mendapatkan keuntungan – keuntungan dari Peristiwa Konflik tersebut. Sejak Tahun 1945, Perang Proxy sering dilakukan dari pada perang tradisional yang berhadapan secara langsung. Perang Proxy telah hadir sebagai perang modern dan mempengaruhi era kontemporer karena dalam bentuk perang ini ada beberapa kekuatan poros yang menggunakan *power*-nya untuk mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut dengan berbagai cara seperti pendanaan perang, Politik adu domba, dll. Hal ini menjadi suatu karakter perang yang signifikan (Quailim, 2022).

Dalam Perang Proxy, aktor negara atau aktor non negara yang bersenjata merupakan suatu hal yang dapat dipandang secara rasional yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menundukan negara lain. Menurut JMR Woundenberg Perang Proxy adalah salah satu langkah strategi kebijakan Luar Negeri yang bersifat rahasia dan tidak menutup kemungkinan dengan strategi tersebut untuk menundukan negara lain demi kepentingan politik secara domestiknya. Hal itu, tanpa memikirkan negara lain atau negara objek yang dijadikan sebuah tujuan untuk melancarkan strateginya. Banyak contoh konstelasi politik yang diambil salah satunya adalah beberapa konflik yang disebabkan perang pasca perang dunia ke – 2 atau perang dingin. JMR Wondersberg dalam tesisnya menjelaskan bahwa langkah proxy war bukan hanya keikutsertaan konflik secara langsung. Akan tetapi, berupa bantuan dana demi mempercepat keuntungan untuk memajukan peningkatan perekonomiannya. Ketika suatu negara pengguna perang proxy yang biasa dilakukan oleh negara kaya dan berhasil dalam melakukan strategi tersebut maka negara yang menjadi korbannya akan mengikuti arahan dan perkembangan situasi dari negara poros tersebut

(Woundersberg, 2011).

Perang Proxy ini digunakan dalam perang modern, meskipun perang tersebut tidak berdampak langsung kepada kedua negara. Akan tetapi, perang ini sangat ampuh digunakan untuk mengalahkan sekutu musuh mereka, atau membantu sekutu dalam melawan musuh – musuhnya. Didalam perangnya terdapat beberapa sistem atau langkah yang dilakukan untuk melancarkan strategi perang proxy dengan diharapkan tidak terlibat dan terkena dampak secara langsung dalam skala penuh.

B. Separatisme

Separatis atau Separatisme dapat diartikan sebagai suatu tindakan seseorang atau kelompok atau komunitas yang berada dalam suatu kesatuan besar atau negara untuk memisahkan diri atau keluar suatu negara tersebut untuk memerdekakan diri menjadi suatu negara. Kelompok tersebut dinamakan separatisme. Tujuan dari memisahkan diri adalah untuk memerdekakan diri dan menjadi negara merdeka dalam berbagai literatur hukum Internasional merupakan salah satu pemberontakan terhadap suatu negara tersebut. Adapun tujuan lain dalam gerakan separatisme ini adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan digantikan dengan pemerintah yang sesuai dengan keinginan bagi suatu kelompok pemberontakan tersebut (Partiana, 1990).

Tiga unsur yang dapat dianggap sebagai variabel fundamental gerakan separatisme yang terjadi pada suatu negara. Pertama, wilayah dan basis teritorial untuk kolektivitas. Kedua, keberadaan kelompok manusia yang bersifat kolektifitas dan cukup besar akan tetapi mengidentifikasi dirinya yang berbeda. Ketiga, hubungan antara Pemerintah dengan kolektivitas atau kelompok manusia tersebut yang berbeda. Dan setiap hubungan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Heraclides, menawarkan tiga pandangan atau perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis penyebab munculnya gerakan separatisme. Perspektif pertama, yaitu etnisitas dan perspektif primordial. Prinsip mendasar ini adalah bahwa etnis merupakan suatu variabel independen esensial yang mengarah kepada ketegasan Politik dan separatisme militan yang muncul karena adanya ketidaksetaraan atau dominasi. Perspektif kedua, komunalisme pendekatan ini berpendapat bahwa akar pada separatisme dapat ditemukan dalam konflik elit atas perubahan dan penggunaan atau alokasi sumber daya. Separatisme berkembang ketika suatu etnis yang diistimewakan sebelumnya terancam. Pendekatan ini berfokus pada unsur elit manipulatif pada pemerintah daerah yang mencari kekuasaan dengan memanfaatkan semangat antar etnis atau komunal untuk tujuann mereka sendiri. Perspektif ketiga, Kolonialisme Internal dalam perspektif ini dijelaskan bahwa negara yang belum terintegrasi cenderung pecah menjadi dua kelompok antara budaya inti yang merupakan budaya dominan dan budaya pinggiran (Muhammad, 2018).

Maksud dan tujuan dalam gerakan separatisme, merupakan perbuatan yang melanggar hukum nasional negara tersebut maka terjadinya suatu pemberontakan atas aksinya. Hal ini dikarenakan didalam pemberontakan tersebut didalamnya terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan dalam pihak ekstrimisme separatisme untuk menyelesaikan misinya dalam menggulingkan suatu pemerintah yang sah atau untuk memisahkan diri dari negara tersebut (Visscher, 1985). Adapun kontradiksi yang terdapat dalam hukum Nasional dan hukum Internasional bahwa dalam Hukum Nasional mengatakan apabila terdapat suatu pemberontakan dan itu mengganggu stabilitasi negara maka pelaku pemberontakan tersebut berhak untuk dihukum. Akan tetapi, dalam Hukum Internasional bahwa tidak mengatur adanya hukuman terdapat suatu kelompok atau pelaku pemberontakan tersebut. Bahkan, Hukum Internasional terdapat didalamnya adanya prinsip *self determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri, hal itu dijadikan suatu alasan Kekuatan bagi para pelaku pemberontakan di mata Internasional.

Pada Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia masa sekarang ini, Pelaku pemberontakan separatisme didakwa selain dengan menggunakan KUHP, juga dengan Undang – Undang diluar KUHP yang berlaku adalah undang – Undang melalui Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 11/PNPS/1963 juncto Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1969. Dalam hukum pidana, Separatisme tergolong sebagai kejahatan keamanan Nasional yang diatur dalam pasal 106 KUHP tentang makar terhadap wilayah negara. Pasal 106 KUHP merumuskan “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun (Nadriah, ANALISIS GERAKAN SEPARATISME MENURUT UNDANG - UNDANG TERORISME, 2022) (Suryohadiprojo, 1997).

C. Ketahanan Nasional

Mula – mula Konsep Ketahanan Nasional dikembangkan oleh para perwira TNI yang terlibat dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia serta dalam menyelesaikan permasalahan keamanan negeri. Karena Perwira TNI selama masa penjajahan Belanda Mengalami Pendidikan Belanda, maka sebelum dinamakan Konsep ini Ketahanan Nasional semula dinamakan dengan istilah Belanda yaitu *Nationale weerbaarheid*. Dalam maknanya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bertahan atas segala goncangan – goncangan yang beragam. Walaupun tidak termasuk *Nationale weerbaarheid* secara keseluruhan dan tetap diartikan atau disamakan dengan Ketahanan Nasional (Suryohadiprojo, 1997).

Ketahanan Nasional Indonesia mengandung makna didalamnya adanya kondisi dinamis

dalam suatu negara, ketangguhan yang membentuk kekuatan nasional dalam mengatasi permasalahan yang mengancam integritas Nasional. Kondisi dinamis itu pun meliputi seluruh aspek dalam yang bersifat alamiah maupun yang bersifat sosial. Aspek yang bersifat alamiah terdapat didalamnya aspek geografis, penduduk, kekayaan alam. Sedangkan yang terdapat dalam aspek sosial yaitu, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan – keamanan. Ketahanan Nasional meliputi dalam dua hal, yaitu Kesejahteraan Nasional dan Keamanan Nasional yang dapat dibedakan dalam dua hal dan tidak dapat dipisahkan.

Terdapat 3 landasan fundamental dalam ketahanan nasional, yaitu:

A. Pancasila sebagai landasan dasar

Pancasila adalah dasar, filosofis, dan ideologi dan pemahaman bagi bangsa dan negara, yang berisikan nilai – nilai yang dianut dan disepakati oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, perilaku yang dilakukan untuk mengamalkan pancasila harus diwujudkan dalam bentuk pola pikir, sikap, dan tindakan bagi seluruh warga Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing – masing. Nilai – Nilai ini menjadi sebuah penyelarasan dan keseimbangan bagi kesatuan dan kebersamaan untuk rakyat Indonesia.

B. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sebuah sumber hukum. UUD 1945 memberikan sebuah landasan hukum bagi seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara serta memberikan arah bagi pengembangan dari segala sistem terutama dalam bidang pertahanan. Substansi pertahanan negara yang disimpulkan dalam pembukaan dan pasal – pasal UUD 1945 adalah sebuah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungan, tujuan, sistem pertahanan, serta keterlibatan warga bagi suatu negara.

C. Landasan visional

Landasan Visional merupakan sebuah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya menjadi suatu bagian yang utuh. Landasan Visional ini adalah sebuah geopolitik Indonesia wilayah Indonesia tersusun dalam gagasan kepulauan nusantara dengan segala isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata bangsanya untuk dapat bersaing dengan daya saing tinggi dalam lingkungan yang strategis.

Perwujudan bagi Landasan Visional adalah sebuah Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan yang mengandung ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi oleh segenap daya dan kemampuan.

1.6. Hipotesis

Secara Faktor Internal, bahwa Penyebab Gerakan Separatisme KKB Papua di Indonesia

sebagai berikut kesenjangan Ekonomi, konflik Identitas, dan Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah (Kukuh Adi Nugroho, 2023). Hal itupun menjadikan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam aspek geografis, ideologis, dan politik. Karena permasalahan yang terdapat di Papua sangat kompleks dan perlu diteliti lebih lanjut oleh beberapa penelitian untuk membangun kesadaran dan tindak lanjut oleh bangsa Indonesia untuk menyelesaikan kasus yang sudah lama terjadi di wilayah Papua.

Faktor Eksternal dalam Gerakan Separatis berupa campur tangan pihak asing yang bersifat tidak menentu tergantung posisi strategis negara yang bersangkutan atau negara – negara besar yang memiliki kepentingan tersebut (Cipto, 2003). Adapun Intervensi yang dilakukan selama ini, berupa dukungan Politik dari beberapa negara – negara Tetangga Pasifik selatan, terutama Australia dan negara – negara himpunan milanesia.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Alasannya dikemukakannya inti dari Penelitian Kualitatif adalah memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Pendekatan Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki Fenomena – Fenomena Sosial dan masalah manusia. Dalam Penelitian ini membuat suatu gambaran atau argumentasi kompleks, meneliti kata – kata, Laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).

Terdapat beberapa aliran filsafat yang membahas mengenai metode Penelitian Kualitatif untuk mengamati Fenomena – Fenomena Sosial yang terjadi. Secara paradigma kualitatif ini saya penulis mengambil Konstruktivisme untuk membahas dan meneliti mengenai studi kasus dalam tema “Proxy War sebagai salah satu sebab Munculnya Gerakan Separatisme KKB Papua di Indonesia”. Dalam teori kritis ini ada beberapa acuan dan pembahasan yang sesuai dengan beberapa landasan konseptual untuk membangun dalam pondasi penelitian ini salah satunya adalah pandangan realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dalam beberapa penjelasan mengenai realitas dengan adanya konstruksi manusia setiap nilai akan berubah dan akan terus berkembang (Murdiyanto, 2020). Oleh karena itu dalam ilmu Hubungan Internasional bahwa setiap isu akan berkembang dan Proxy War adalah salah satu perang abad modern dan itu akan terus berkembang sesuai dengan Konstruksi Manusia.

1.7.2. Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengumpulan data adalah langkah yang berpengaruh dan strategis dalam suatu

Penelitian. Metode Pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat Penting dalam Penelitian, karena tujuan utama dari Penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2005). Sumber data yang diperoleh melalui data sekunder, Data Sekunder adalah data keterangan yang diperoleh berupa catatan, seperti buku, jurnal, bulletin, majalah, dokumen atau arsip dan sejenisnya. Berupa hal yang baru maupun secara Historis, menggunakan studi Pustaka atau kepustakaan, dan internet.

1.7.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk Penelitian Kualitatif ini yaitu dilakukan dengan cara mengorganisir data, menemukan pola, dan menemukan apa yang diperbincangkan oleh orang lain (Suryabrata, 2010). Adapun Teknik Analisa data Penelitian Kualitatif dapat dimulaidari :

1. Analisis Data

Analisis dalam pengumpulan data, secara umum dapat dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan Analisis Data selama pengumpulan meliputi: focus dalam menetapkan Penelitian, Penyusunan Temuan Sementara dari data yang sudah terkumpul, Pembuatan Rencana Pengumpulan data berikutnya, penetapan sasara berupa Informasi, Situasi, dan dokumen (Suryabrata, 2010).

2. Reduksionis

Dengan metode Penelitian Analisa Reduksionis bahwa Unit Analisa lebih besar daripada Unit Eksplanasi. Dalam Proses Penelitiannya harus diteliti mana yang harus dipakai atau tidak yang merupakan ringkasan, Cerita, apa yang sedang berkembang.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang diambil berupa sekumpulan Informasi yang tersusun dan memberkan kemungkinan adanya sebuah Kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari penyajian tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan dan kejelasan Data yang detail dan substantif untuk mendukung Penelitian ini.

4. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penarikannya sejatinya adalah sebagian pada suatu kegiatan yang utuh.

1.7.4. Objek Penelitian

Objek yang akan diamati dalam Penelitian ini Gerakan Separatisme KKB di Papua sebagai Manifestasi Proxy War. Penelitian ini dikhususkan terhadap Faktor – Faktor apa saja yang menjadikan Papua sebagai objek Proxy War Melalui Gerakan Separatisme untuk memisahkan diri

dari kedaulatan NKRI.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan menjelaskan mengenai Faktor – Faktor apa saja yang menjadikan Konflik Papua berlangsung lama yang dapat mencakup berbagai aspek yang luas dan kompleks dan akan di fokuskan dalam beberapa penjelasan berikutnya mengenai Gerakan Separatisme KKB Papua sebagai berikut.

BAB I : bab ini menjelaskan secara gambaran awal bagaimana kondisi terjadinya konflik Papua secara Internal maupun Eksternal dalam beberapa sub bab sebagai berikut; Latar Belakang, Tujuan Riset, Kajian Pustaka, Hipotesa, dan Metode Penelitian.

BAB II : Bab ini akan membahas mengenai Fokus tema yang saya tulis yaitu “Proxy War sebagai salah satu sebab munculnya gerakan separatisme KKB Papua di Indonesia”. menjelaskan dan merincikan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu mengenai Faktor Internal dalam Konflik Papua.

BAB III : Bab ini akan membahas mengenai Fokus tema yang saya tulis yaitu “Proxy War sebagai salah satu sebab munculnya gerakan separatisme KKB Papua di Indonesia”. menjelaskan dan merincikan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu mengenai Faktor Eksternal dalam Konflik Papua.

BAB IV : Bab ini berisi kesimpulan dari bab – bab sebelumnya yang memberikan jawaban atau rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun sub – bab yang tertulis di bab ini meliputi Kesimpulan Implikasi Saran.